

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto oleh gerakan Reformasi pada 1998 telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Wacana demokratisasi yang menjadi agenda utama gerakan Reformasi mendorong parlemen untuk melakukan amandemen konstitusi serta menerbitkan berbagai produk hukum yang dapat mendukung demokratisasi tersebut. Salah satu tuntutan Reformasi adalah desentralisasi politik seluas-luasnya agar dapat menghadirkan demokrasi secara nyata hingga ke tingkat daerah. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak awal lahirnya desentralisasi politik di Indonesia, yang selanjutnya semakin kuat dengan diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung melalui instrumen UU No 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999.

Konsekuensi dari lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang melahirkan Pilkada langsung adalah pergeseran arena pertarungan politik di daerah yang tidak lagi dimonopoli oleh kekuasaan pemerintah pusat, namun juga melibatkan masyarakat sipil secara langsung. Elite-elite politik lokal mulai memiliki panggung untuk turut terlibat dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah, salah satunya adalah elite agama. Ulama atau Kiai sebagai elite agama Islam yang selama Orde Baru banyak berkutat di ranah kultural, pada era Reformasi turut bertransformasi menjadi elite politik yang memiliki kontribusi besar dalam

Pilkada, baik itu menjadi calon kepala daerah, maupun mendukung pasangan calon kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di seluruh Indonesia. Tuban adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yang diikuti oleh tiga calon bupati dan wakil bupati yaitu: **(1) Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar** diusung oleh PKB; **(2) Aditya Halindra Faridzki-Riyadi** diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan PKS; dan **(3) Setiajit-Armayana Mangkunegara** diusung oleh PDIP, Gerindra, PAN, PPP, dan PBB. Pencalonan Aditya Halindra Faridzky sebagai bupati Tuban dalam Pilkada Tuban 2020 adalah langkah berani yang diambil oleh Partai Golkar. Pasalnya, Aditya Halindra Faridzky masih tergolong tokoh muda jika dibandingkan dengan calon-calon bupati dan wakil bupati Tuban lainnya, yaitu berusia 28 Tahun. Namun, keberanian Partai Golkar untuk mencalonkan Aditya Halindra Faridzky bukanlah keputusan yang tanpa perhitungan. Aditya Halindra Faridzky adalah putra kedua dari Haeny Relawati Widyastuti, Bupati Tuban periode 2001-2016 dan 2006-2011. Partai Golkar membaca kondisi sosial politik di Tuban di mana terdapat kerinduan adanya pembangunan yang gencar sebagaimana masa kepemimpinan Haeny, sehingga mengharapkan adanya penerus atau trah Haeny yang dapat kembali memimpin Kabupaten Tuban.

Pilkada Tuban 2020 dimenangkan oleh Aditya Halindra Faridzky-Riyadi dengan presentase perolehan suara 60%. Sementara pasangan calon Khozanah Hidayati-M. Anwar dan Setiajit-Armayana Mangkunegara masing-masing

memperoleh presentase suara 24,2% dan 15,8%. Kemenangan Aditya Halindra Faridzky-Riyadi tidak terlepas dari salah satunya adalah popularitas Haeny yang masih memiliki basis massa simpatisan yang besar di Tuban, serta figur Aditya Halindra Faridzky sendiri yang merupakan tokoh muda yang dianggap dekat dengan pemilih muda.

Pilkada di Tuban baik pada Pilkada serentak 2020 maupun berbagai Pilkada periode sebelumnya kerap kali menyajikan fenomena sosial di mana tokoh agama yaitu Kiai dan Ulama banyak terlibat dalam dinamika politik baik itu terlibat secara langsung sebagai calon maupun mendukung calon tertentu. Kiai dan Ulama di Tuban, meskipun lebih sering memainkan peran yang lebih simbolik dalam Pilkada pasca reformasi, tetap merupakan aktor penting dalam setiap kontestasi politik. Dalam Pilkada Tuban 2020, semua calon bupati dan wakil bupati terlihat jelas berusaha untuk untuk menginstrumentasi ketokohan Kiai dan Ulama dengan melakukan pendekatan politik secara intensif dengan melakukan *sowan* atau berkunjung ke Kiai. Kunjungan calon bupati dan wakil bupati itu sesungguhnya dengan mudah dapat dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan politik dari para elite agama tersebut beserta para santri dan pengikutnya sehingga dapat mendulang suara dalam pemilu, meskipun ada akar kultural kuat yang memang melatarbelakangi perilaku politik tersebut.

Berbeda dengan pasangan nomor urut 01 yang berfokus melakukan pendekatan politik kepada Ulama dan Kiai besar NU karena merupakan pasangan yang diusung oleh PKB yang memiliki kedekatan secara kultural dan structural dengan NU, pasangan nomor urut 02 lebih intensif melakukan *sowan* di area akar

rumpun (*grass root*) yaitu Kiai-Kiai dan pondok-pondok pesantren yang berada di wilayah pedesaan. Beberapa Kiai yang dikunjungi adalah Kiai Alvin Abu Ali pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Gus Junaidi (Gus Joned), Habib Mustofa Al-Idrus, Gus Zaki pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad, KH Mahfudz Sholih AL-Hafidz pengasuh Pondok Pesantren Al-Umariyyah Sunan Kalijogo, Gus Jalil dan Gus Arif kecamatan Bangilan, KH Yunan Pondok Pesantren As-Salam, KH Samsul Huda Pondok Pesantren Al-Husna Al-Alawy. Meskipun pamor Kiai-Kiai dan pondok pesantren di kampung tidak sebesar, misalnya, KH. Ubaidillah Faqih pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Kiai-Kiai kampung tetap memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat.

Sowan yang dilakukan oleh calon bupati Aditya Halindra Faridzky dan calon-calon lainnya dalam masa kampanye pilkada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun di era di mana akses informasi terbuka lebar yang memungkinkan setiap orang memiliki preferensi politik masing-masing, Kiai tetap memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi arah politik masyarakat. Hal tersebut disadari oleh para calon bupati dan wakil bupati Tuban, sehingga mereka intensif melakukan pendekatan politik meskipun Ulama dan Kiai tidak melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran. Di lain sisi, hubungan politik dengan politisi membuat Kiai dapat menempatkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya maupun personal kepada calon bupati sebagai calon pemangku kebijakan. Relasi antara calon bupati dengan Kiai dalam Pilkada tersebut merupakan bentuk pemanfaatan kepemimpinan tradisional Kiai di masyarakat sebagai *vote gathering* dengan mempengaruhi persepsi masyarakat sebagai calon

pemilih akan calon bupati yang memiliki kedekatan politik dengan Kiai yang mereka patuhi.

Kepemimpinan tradisional, Menurut Weber, adalah sebuah kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu, sehingga anggota atau pengikut dalam kelompok tersebut yang telah memiliki kepatuhan terhadap pemimpin yang terdahulu secara otomatis akan patuh terhadap otoritas dan menjadi pengikut dari pemimpin mereka yang baru.¹ Kiai sebagai pemimpin tradisional di masyarakat yang mewarisi otoritas sebagai pemimpin non formal di masyarakat yang diwarisinya dari keturunan ditambah dengan pengetahuannya dalam bidang keagamaan menjadikan kiai memiliki karakter sebagai pemimpin kharismatik. Max Weber menjelaskan bahwa kharismatik merujuk kepada sebuah kualitas seprang individu tertentu.² Dalam kepemimpinan kharismatik, legitimasi didasarkan kepada kesetiaan dari para pengikutnya, kesucian luar biasa, teladan, heroism atau kemampuan istimewa.³ Kepemimpinan kharismatik memahami bahwa seorang pemimpin diyakini adalah seseorang yang telah diilhami oleh Tuhan berupa kekuatan supranatural. Weber menyebut bahwa seseorang dikatakan memiliki kepemimpinan kharismatik apabila orang tersebut dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah ia memiliki kekuatan atau kualitas supranatural, supramanusia atau sekuat-kuatnya

¹ Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Tr. Talcott Parson. New York: The Free Press, 1966

² Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), 358.

³ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), 220.

kekuatan tidak lazim yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa⁴ para pengikut atau orang-orang di sekitar pemimpin kharismatik mengakui adanya kemampuan tersebut yang didasarkan pada kepercayaan dan pemujaan karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tadi merupakan sesuatu yang berada di atas kepercayaan dan kemampuan manusia pada umumnya.

Kedekatan politik antara calon bupati kepada Kiai yang ditunjukkan dengan praktik-praktik *sowan* atau kunjungan ke kediaman Kiai atau pesantren didasari oleh kesadaran kultural dari calon bupati bahwa Kiai sebagai pemimpin agama memiliki modal sosial yang besar berupa pengikut/jamaah dengan jumlah yang besar dan loyal. Calon bupati merasa perlu untuk menjalin relasi dengan Kiai untuk menunjukkan secara simbolis kepada publik bahwa dirinya telah mendapatkan ‘restu’ dari Kiai. Afirmasi kultural berupa ‘restu’ dari Kiai, meskipun tidak selalu menentukan perolehan suara dalam pilkada, tetap merupakan modal sosial yang penting untuk memberikan rasa ‘aman’ kepada calon bupati dalam pencalonan politik di daerah yang masih menjunjung tinggi kepatuhan terhadap tokoh agama.

Memperhatikan strategi pasangan calon Aditya Halindra Faridzky-Riyadi yang berupaya mendekati Kiai dan Ulama menarik untuk diteliti sebagai bentuk mobilisasi simbolik kultural dalam memanfaatkan ketokohan kiai sebagai pemimpin tradisional.

⁴ Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah politik Aditya Halindra Faridzky terhadap Kiai dalam memanfaatkan kepemimpinan tradisional Kiai untuk mendulang suara pemilih dalam Pilkada Tuban 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah dan tindakan politik Aditya Halindra Faridzky untuk memperkuat pencalonannya dengan memanfaatkan kepemimpinan tradisional Kiai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi berbagai manfaat baik itu yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. **Manfaat teoritis:** penelitian ini diharapkan mampu untuk menyumbangkan wawasan serta memperkaya perspektif baru dalam kajian mengenai desentralisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru yang termanifestasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung pada umumnya, serta kajian tentang relasi antara elite-politik dengan elite agama di Indonesia pada khususnya yang telah banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial dan politik di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. **Manfaat praktis:** melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian mengenai desentralisasi politik di Indonesia serta hubungan antar elite politik dan agama yang terjalin di dalamnya mampu dijadikan bahan kajian oleh para praktisi politik dalam upaya melihat realitas politik dan kultural di Indonesia sehingga tidak hanya mampu terlibat dalam berbagai agenda politik, namun juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam upaya untuk semakin menguatkan konsolidasi demokrasi Indonesia.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

1.5.1 Relasi Patron-Klien

Istilah “patron” berasal dari bahasa Spanyol yang apabila dipahami secara etimologis memiliki arti seseorang yang memiliki kekuatan, status, kekuasaan, wewenang, dan pengaruh.⁵ Sementara Klien dapat diartikan sebagai seorang bawahan atau orang yang menerima perintah. Relasi patron-klien ini merupakan hubungan antara dua pihak atau kelompok, maupun individu yang memiliki status sosial yang tidak sederajat baik itu secara ekonomi, kekuasaan, maupun status. Dalam relasi ini, patron ditempatkan lebih tinggi atau superior, sementara klien memiliki kedudukan yang inferior atau lebih rendah.

⁵ Usman, Sunyoto. *Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD), 2004.

Dalam relasi ini, patron adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada kliennya. Di Indonesia sendiri, relasi patron-klien kerap disebut sebagai hubungan “bapak-anak buah”, di mana seorang bapak (patron) berusaha untuk membangun sebuah keluarga besar (extended family) dengan tujuan untuk menyusun kekuasaan serta pengaruh. Selanjutnya, seorang bapak sebagai patron memiliki tanggung jawab untuk menjalin relasi dengan anak buah sebagai klien secara personal tanpa adanya ikatan ideologis maupun politis. Sementara itu, anak buah memberikan balasan kepada ‘bapak’ berupa dukungan maupun bantuan.⁶

Tujuan mendasar dari relasi patron-klien ini bagi klien sesungguhnya merupakan bagian dari usaha untuk memperoleh jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Melemahnya transaksi yang menjadi fondasi utama dalam relasi patron-klien dengan indikasi tidak ada lagi jaminan sosial dasar subsistensi dan keamanan bagi klien akan membuat klien merasa tidak ada lagi keadilan dalam relasi ini karena bersifat eksploitatif. Apabila hal tersebut terjadi, patron akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari klien, sehingga berpotensi melemahkan relasi ini.

1.5.2 Pilkada

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

⁶ Scott, James. *The Moral Economy of The Peasant, Rebellion dan Subsistence in Southeast Asia*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1989.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pilkada atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Dalam skripsi ini, yang penulis maksud sebagai pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah Kabupaten Tuban tahun 2020.

1.5.3 Calon Kepala Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, calon kepala daerah yang dalam hal ini adalah Calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sementara Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Skripsi ini, yang penulis maksud sebagai calon kepala daerah adalah calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Tuban 2020.

1.5.4 Mobilisasi Politik

Mobilisasi politik adalah usaha yang dilakukan untuk merekrut individu maupun kelompok agar dapat terlibat dalam proses politik.⁷ Di negara demokrasi, mobilisasi politik kerap kali dibenturkan dengan partisipasi politik. Padahal, mobilisasi politik dapat dilihat sebagai proses awal dalam sebuah evolusi partisipasi politik. Meskipun secara ideal partisipasi politik merupakan salah satu indikasi baik-buruknya iklim demokrasi, pada kenyataannya realitas politik dalam demokrasi tidak selalu menunjukkan adanya partisipasi politik yang memadai. Partisipasi masyarakat selain berasal dari kesadaran otonom (*autonomous participation*), juga berasal dari ajakan atau penggerakan dari pihak lain (*mobilized participation*).⁸

Terdapat dua jenis mobilisasi, yaitu mobilisasi yang bersifat langsung, dan mobilisasi tidak langsung.⁹ Mobilisasi langsung adalah kegiatan mobilisasi yang mengarahkan masyarakat atau massa untuk melakukan tindakan politik sebagaimana yang diinginkan oleh mobilisator. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai cara pandang tertentu kepada massa dengan harapan massa dapat mengekspresikan cara pandang tersebut dalam sebuah keputusan maupun tindakan politik.

Partai politik kerap kali dianggap sebagai instrumen utama dalam mobilisasi politik, di mana partai politik memiliki cabang-cabangnya menjalankan

⁷ Karp, Jeffrey A., Susan Banducci A., Shaun. *Getting Out of The Vote. Party Mobilization in a Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.2007

⁸ Huntington, P. Samuel. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

⁹ Stefano. *The Political Mobilization of The Europe Left, 1860-1980: The Class Clavage*. New York: Cambridge University Press, 2007

berbagai kegiatan elektoral dalam rangka memenangkan pemilu.¹⁰ Massa dapat bertransformasi menjadi pemilih yang partisan lewat kegiatan mobilisasi politik oleh partai politik yang terorganisir.¹¹ Bahkan, dalam kampanye pemilu Amerika Serikat kerap kali ditemui kasus mobilisasi politik yang memanfaatkan jaringan ras dan etnis.¹² Narasi keagamaan dan isu gender juga digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik pemilih perempuan di Mesir.¹³

1.5.5 Kiai atau Ulama

Istilah Kiai dan Ulama kerap kali mengalami kerancuan satu sama lain. Ulama adalah istilah yang merupakan bentuk jamak dari *al alim* yang berarti seseorang yang memiliki pengetahuan. Kata *al ulama* terdapat di Alquran dan disebutkan sebanyak dua kali, sementara *al alim* disebutkan 13 kali.¹⁴ Berbeda dengan istilah Ulama yang cenderung tekstual berdasarkan kitab suci, istilah Kiai sendiri merupakan sebuah gelar yang menjadi konsensus dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara yang merujuk kepada seorang ahli agama. Kiai dalam kehidupan sosial merupakan orang yang memiliki pemahaman agama dan mengajarkannya kepada masyarakat. Karenanya, di lingkungan pondok pesantren, Kiai identik dengan Ulama.¹⁵

¹⁰ Duverger, M. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co, 1959

¹¹ Karp, Jeffrey A., Susan Banducci A., Shaun. *Getting Out of The Vote. Party Mobilization in a Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007

¹² Nuno, SA. "Latino Mobilization and Vote Choice in the 2000 Presidential Election." *American Politics Research*, 2007 : 61-66.

¹³ Blaydes, L. dan S. Tarauty. "Women's Electoral Participation in Egypt: The Implication of Gender for Voter Recruitment and Mobilization." *The Middle East Journal*, 2009 : 27-32

¹⁴ Patoni ,Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Jogakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

¹⁵ Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Di Indonesia, gelar Kiai sangat populer untuk menyebut seorang *alim ulama* Islam. Sebutan tersebut pada umumnya merujuk pada figur tertentu yang dianggap memiliki kapasitas serta kapabilitas yang tidak diragukan lagi dalam ilmu-ilmu agama Islam. Zamkhsari Dhofier merupakan ilmuwan yang dianggap memelopori kajian mengenai Kiai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dhofier menjelaskan bahwa Kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam atau pondo pesantren yang mengajarkan kitab klasik kepada para pelajar atau santrinya.¹⁶

Akan tetapi, dalam tradisi masyarakat Jawa, istilah Kiai pada awalnya merujuk pada sesuatu yang lebih luas daripada sekadar seorang ahli agama. *Pertama*, Kiai adalah sebutan untuk benda atau barang-barang terhormat yang dianggap keramat, seperti Keris, bahkan untuk kerbau keramat di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. *Kedua*, gelar Kiai disematkan kepada orang tua atau tokoh yang terhormat baik itu karena keilmuannya maupun karena keturunan dan tingkat perekonomiannya yang membuatnya memiliki tempat yang tinggi dalam stratifikasi sosial. *Ketiga*, Kiai adalah gelar yang diberikan untuk seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam, selain juga memiliki pondok pesantren yang mengajarkan kitab kuning.¹⁷

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, peran terpenting Kiai adalah untuk menggerakkan keimanan masyarakat melalui pengajaran doktrin-doktrin

¹⁶ Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982

¹⁷ *Ibid*

keagamaan yang dapat memelihara berbagai amalan agama di kalangan masyarakat Islam.¹⁸ Akan tetapi, di luar peran paling penting tersebut, seorang Kiai, khususnya yang menaungi pesantren, juga memiliki peran yang lebih luas lagi. Selain memiliki tugas mengasuh santri-santri yang ada dalam pesantren yang dinaunginya, Kiai juga berperan dalam menawarkan berbagai agenda perubahan sosial keagamaan dalam masyarakat. Perubahan sosial keagamaan tersebut tidak terbatas pada permasalahan interpretasi agama, namun juga terkait dengan cara hidup yang didasarkan pada agama yang memberi bukti konkret pada perubahan sosial, serta mendampingi santri dalam perekonomian dan perilaku yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat.¹⁹ Meluasnya peran sosial Kiai dalam masyarakat tersebut digunakan oleh kiai untuk melakukan berbagai perubahan sosial secara bertahap (*gradual*) dengan cara memfungsikan ikatan-ikatan sosial keagamaan.

1.6 KERANGKA TEORITIK

1.6.1 Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai siapa dan tanggung jawab, kewajiban, atau tugas apa yang dibebankan kepadanya. Otoritas seorang pemimpin bisa sangat besar atau terbatas serta legitimasi mereka berdasarkan moral, rasional, atau hal-hal praktikal yang mendasar. Psikologis-sosial membedakan antara kepemimpinan yang bersifat instrumental dan afektif. Pada kepemimpinan yang bersifat instrumental menjalankan fungsi dan perannya ada

¹⁸ Hirokoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.

¹⁹ *Ibid*

kelompok berdasarkan kinerja atas tugas dan tujuan, sementara kepemimpinan afektif berusaha untuk menjaga relasi antar anggota dan kelompok. Berdasarkan sifat alami organisasi, seorang pemimpin dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang bersifat afektif atau instrumental, maupun keduanya sekaligus. Sebuah kepemimpinan juga dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan transaksional seperti yang ada dalam partai politik, legislative atau eksekutif atau kepemimpinan transformative seperti yang terdapat dalam gerakan reformasi, revolusi, atau kepemimpinan ideologis.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan kharismatik Max Weber untuk menganalisa peran Kiai sebagai pemimpin di masyarakat berdasarkan keturunan dan norma-norma tradisional yang berlaku di masyarakat dan kharisma Kiai yang didasarkan pada anggapan bahwa Kiai merupakan orang suci yang harus dipatuhi kemudian dimanfaatkan oleh calon bupati Tuban untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam rangka mendulang suara dalam pilkada.

Kepemimpinan tradisional, Menurut Weber, adalah sebuah kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu, sehingga anggota atau pengikut dalam kelompok tersebut yang telah memiliki kepatuhan terhadap pemimpin yang terdahulu secara otomatis akan patuh terhadap otoritas dan menjadi pengikut dari pemimpin mereka yang baru.²¹ Kepemimpinan tradisional didasarkan pada keyakinan akan pentingnya keberlanjutan etika norma yang telah ada sejak dahulu serta legitimasi dari mereka

²⁰ Epley, Jennifer L.. "Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics" *International Journal of Humanities and Social Science*, 2015 : Vol.5, No.7. 7-17

²¹ Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Tr. Talcott Parson. New York: The Free Press, 1966

yang merepresentasikan keberlanjutan tersebut. Dalam masyarakat yang mempercayai kepemimpinan tradisional, terdapat anggapan bahwa terdapat kebajikan dan kesucian atau kekudusan dalam aturan tradisional di tengah masyarakat mengenai kepemimpinan. Hak untuk melanjutkan kepemimpinan adalah berdasarkan warisan, sehingga orang-orang yang dianggap berhak untuk melanjutkan kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya bisa jadi adalah sanak saudara, keluarga, atau orang kepercayaan. Hal ini disebut sebagai *patrimonial recruitment*.²²

Max Weber membagi kepemimpinan tradisional dalam tiga jenis, yaitu gerontokrasi, patriarkhalisme, dan patrimonialisme.²³ Gerontokrasi merupakan wewenang yang berada pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok. Patriarkhalisme adalah jenis wewenang yang kekuasaannya berada dalam tangan suatu kelompok kekerabatan/family yang dikuasai oleh seorang individu tertentu dan memiliki otoritas warisan.²⁴ Sementara patrimonialisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerja sama dengan kerabat-kerabatnya atau orang terdekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya.²⁵ Dalam kepemimpinan tradisional tersebut, ciri utama yang paling melekat adalah bahwa system norma dianggap keramat sehingga pelanggaran terhadapnya akan

²² *Ibid*

²³ Shofi, Ibnu. "ANALISIS TEORI OTORITAS MAX WEBBER DALAM KEPEMIMPINAN MULTIKULTURAL KIAI SHOLEH BAHRUDDIN NGALAH (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan)" *Jurnal Pendidikan Islam*, 2021 : Vol.11, No.1, 134-157.

²⁴ Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994)

²⁵ Siahaan, Hotman. *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 1986. 202

menyebabkan bencana. Selain itu, sang pemimpin merumuskan berbagai keputusannya atas dasar pertimbangan pribadi, alih-alih pertimbangan fungsinya.

Max Weber menjelaskan bahwa kharismatik merujuk kepada sebuah kualitas seprang individu tertentu.²⁶ Dalam kepemimpinan kharismatik, legitimasi didasarkan kepada kesetiaan dari para pengikutnya, kesucian luar biasa, teladan, heroism atau kemampuan istimewa.²⁷ Kepemimpinan kharismatik memahami bahwa seorang pemimpin diyakini adalah seseorang yang telah diilhami oleh Tuhan berupa kekuatan supranatural. Weber menyebut bahwa seseorang dikatakan memiliki kepemimpinan kharismatik apabila orang tersebut dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah ia memiliki kekuatan atau kualitas supranatural, supramanusia atau sekuat-kuatnya kekuatan tidak lazim yang tidak yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa²⁸ para pengikut atau orang-orang di sekitar pemimpin kharismatik mengakui adanya kemampuan tersebut yang didasarkan pada kepercayaan dan pemujaan karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tadi merupakan sesuatu yang berada di atas kepercayaan dan kemampuan manusia pada umumnya.

Meskipun terdapat perbedaan karakter kepemimpinan kharismatik dalam konteks komunitas politik dan komunitas agama, kepemimpinan kharismatik dalam kedua jenis komunitas ini memiliki gejala yang sama, yaitu:

²⁶ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), 358.

²⁷ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), 220.

²⁸ Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- (a) pemimpin yang memiliki otoritas karismatik mempunyai kesadaran akan misi dan panggilan yang terwujud dalam ide dan memanggil orang untuk ikut serta dalam misinya,
- (b) terdapat para pengikut yang mengakui kharisma pemimpin yang mendorong mereka untuk mengikuti, menaati, setia terhadap misi,
- (c) keikutsertaan pendukung, selain mengakui kharisma pemimpin, juga karena kekecewaan mereka terhadap situasi krisis yang mereka alami. Bila pemimpin itu bisa menjawab harapan mereka dan mengatasi situasi krisis, maka kesetiaan dan antusiasme pengikut bertahan; bila tidak, maka secara berangsur pemimpin itu akan ditinggalkan.
- (d) Otoritas kharismatis dijalankan bersama pengikut setia. Mereka dipilih karena kualitas kharismatik pribadi. Tidak ada hirarki dan control, yang berlaku hanya panggilan berdasarkan kharisma anggota.
- (e) Kharisma itu bersifat extra-legal, mengabaikan struktur dan aturan formal. Pemimpin kharismatik hanya mengenal inner determination dan inner restraint. Pengikut menyesuaikan diri dengan inspirasi dan kehendak pemimpin.
- (f) Relasi dalam komunitas bersifat personal. Karena pemimpin muncul dalam situasi krisis, otoritas ini tidak stabil. Ia bisa berakhir dan mengalami transformasi ke arah otoritas tradisional dan legal.
- (g) Karena menonjol dalam situasi kritis dan tidak stabil, maka otoritas kharismatis adalah kekuatan revolusioner, cenderung menerobos

tatanan dan nilai yang sudah mapan, dan merintis nilai dan tatanan baru

Pelibatan Kiai dalam pilkada Tuban adalah salah satu wujud pengakuan akan kharisma Kiai sebagai seorang pemimpin di masyarakat. Kiai sendiri di lingkungan pesantren secara khusus dan masyarakat pada umumnya, memperoleh kepemimpinan tradisional berdasarkan keturunan. Mayoritas Kiai merupakan anak atau minimal keluarga dari Kiai terdahulu yang menjadi pemimpin di pesantren atau komunitas masyarakat. Anak dari Kiai mewarisi kepemimpinan dari ayahnya karena sesuai dengan konsep kepemimpinan tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber di mana seorang pemimpin memperoleh otoritasnya berdasarkan keturunan.

Kiai dalam kepercayaan masyarakat Islam terutama di Jawa dianggap sebagai tokoh yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat gaib yang hanya diberikan kepada segelintir manusia.²⁹ Tokoh agama kharismatik memiliki ilham suatu kesadaran untuk melaksanakan sebuah misi dari Tuhan untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Dalam definisi Weber mengenai kepemimpinan kharismatik sebagai “suatu kepribadian khusus dari seorang pemimpin seolah ia diberkati dengan kekuatan gaib”, perlu diperhatikan bahwa Weber menitikberatkan bukan pada siapa tokoh tersebut, melainkan pada bagaimana persepsi masyarakat kepada pemimpinnya.

Kiai dianggap sebagai tokoh yang tidak hanya memiliki kemampuan dan pemahaman akan ilmu agama Islam yang memadai, namun juga dianggap suci

²⁹ Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.

dan sakral. Kesakralan figur seorang kiai yang dianggap mendapatkan ilham dari Allah SWT itulah yang menjadikan kiai sebagai pemimpin kharismatik. Kharisma seorang Kiai menjadikannya figur yang dipatuhi oleh masyarakat dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kehidupan sosial lainnya. Tidak jarang seorang Kiai turut mengarahkan pilihan politik masyarakat, pengikut, jamaah atau santrinya dalam kontestasi politik. Terlepas dari apakah petuah atau arahan dari Kiai untuk memilih pilihan tertentu dalam kontestasi politik akan diikuti oleh para santri atau jamaahnya, kharisma seorang kiai sudah mampu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon tertentu apabila ia menjalin kedekatan politik dengan Kiai. Hal itulah yang mendorong calon bupati Tuban untuk melakukan sowan ke Kiai dan pondok pesantren.

Keterlibatan Kiai dalam kancah politik merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam setiap kontestasi politik nasional maupun lokal, baik partisan maupun independen. Apabila dilihat dari sisi sosio-antropologis, Kiai merupakan figur yang termasuk dalam kelompok elit sosial. Karenanya, tidak mengherankan apabila dalam kehidupan sosial, Kiai memiliki keistimewaan hak dan kekuasaan cukup besar. Dalam komunitas Islam tradisional, Kiai memiliki peran penting kepada masyarakat dalam memberikan petuah atau bimbingan yang dilandasi dari nilai dan moralitas ajaran Islam dalam rangka menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat.

Relasi antara calon bupati dan Kiai sebagaimana yang terjadi di Pilkada Tuban tahun 2020 adalah pemanfaatan ketokohan Kiai oleh tokoh politik untuk menggiring massa. Noah (2014) menyebut bahwa pelibatan Kiai dalam politik

dapat berguna sebagai “pembentuk preferensi politik”, sebagaimana yang terjadi dalam pilpres 2004 di mana para pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan Kiai sebagai penggerak massa secara formal dengan memasukkannya sebagai anggota tim sukses, maupun secara informal dengan memanfaatkan gerakan-gerakan kultural.³⁰ Pelibatan Kiai secara formal maupun informal dalam kontestasi politik adalah kesadaran mengenai kondisi sosial dan politik masyarakat tradisional yang belum memiliki kesadaran politik untuk melihat figur atau tokoh politik secara rasional. Masyarakat tradisional yang belum memiliki rasionalitas dalam berpolitik seperti mengkritisi program politik sehingga lebih melihat hal-hal yang mengelilingi tokoh politik tersebut, yang dalam hal ini adalah personalitas dan siapa saja yang mendukungnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang tokoh politik untuk memilih siapa yang mereka rekrut sebagai tim sukses atau tokoh yang harus didekati secara politis, yang dalam konteks ini adalah seorang Kiai.

Selain untuk membentuk preferensi politik masyarakat, peran Kiai dalam dinamika politik, khususnya di Jawa Timur, adalah sebagai penggaet suara atau *vote gathering*. Contoh nyata bahwa Kiai memerankan peran sebagai penggaet suara adalah keterlibatannya dalam kampanye baik secara formal sebagai bagian dari tim sukses, maupun secara informal dengan hadir dalam kegiatan kampanye. Tidak hanya dalam kegiatan kampanye, Kiai juga dapat memengaruhi pandangan politik masyarakat dengan mempersuasi mereka melalui ceramah keagamaan yang mengandung dorongan atau nasihat untuk melakukan tindakan politik

³⁰ Noeh, Munawar Fuad. *Kyai di Panggung Pemilu: Dari Kyai Khos Sampai High Cost*. Jakarta: Renebook. 2014

tertentu sesuai dengan pertimbangan pribadinya. Kiai masih memegang peran sebagai “panglima” yang dapat menumbuhkan keyakinan kepada masyarakat calon pemilih, terutama masyarakat di kalangan *grass root* atau akar rumput yang masih memegang kepatuhan yang tinggi kepada Kiai meskipun berada di alam demokrasi yang dinamis.³¹

Dalam kasus relasi antara politisi dan Kiai, kontestasi Pilpres 2004 di Jawa Timur melibatkan Kiai sebagai pemegang peranan penting dalam menentukan preferensi politik masyarakat terjadi dalam bentuk-bentuk hubungan yang variatif.³² Semua pasangan calon presiden dan wakil presiden melibatkan Kiai dalam proses politik secara formal dan informal. Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang tidak memiliki latar belakang NU sekuat Megawati-Hasyim atau Wiranto-Sholah, lebih selektif dalam melakukan pendekatan politik ke Kiai. Sementara Wiranto yang berpasangan dengan tokoh NU Sholahudin Wahid mendapatkan dukungan besar dari para Kiai “Poros Langitan” yang awalnya mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Begitu pula dengan pasangan Megawati yang berpasangan dengan tokoh NU Hasyim Muzadi sangat kental terasa bagaimana peran Kiai dimainkan dalam menggaet suara pemilih hingga memasukkan Kiai dalam tim sukses mereka.

Apa yang terjadi dalam Pilkada Tuban 2020 di mana Aditya Halindra Faridzky menjalin relasi politik dengan Kiai sebatas sebagai sesuatu yang bersifat kultural simbolik dalam memanfaatkan peranan kiai sebagai pemimpin tradisional

³¹ Hajar, Ibnu. *Kiai di Tengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2009

³² Noeh, Munawar Fuad. *Kyai di Panggung Pemilu: Dari Kyai Khos Sampai High Cost*. Jakarta: Renebook. 2014

yang kharismatik. Kiai dianggap mampu menjembatani aspirasi masyarakat terhadap calon bupati sebagai calon pemegang otoritas legal. Kedekatan politik itu juga dimaksudkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat bahwa Aditya Halindra Faridzky telah mendapatkan restu dari Kiai untuk menjadi calon bupati.

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya suatu penelitian sehingga dapat mengetahui data yang dibutuhkan serta data yang dibuang sebagai jawaban rumusan masalah.³³ Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah pemanfaatan ketokohan Kiai oleh Aditya Halindra Faridzky dalam Pilkada Tuban tahun 2020 yang termanifestasi dalam kegiatan sowan atau kunjungan calon bupati kepada Kiai.

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dapat menguraikan sebuah realitas dan gejala sosial di masyarakat. Kedekatan politik antara calon bupati Tuban dengan Kiai dalam Pilkada Tuban tahun 2020 adalah fenomena politik yang mengindikasikan adanya hubungan transaksional kepentingan. Para calon bupati Tuban melakukan berbagai kunjungan kepada Kiai dan Ulama dalam masa kampanye secara kasat mata dapat dilihat sebagai agenda kultural sebagai bagian dari penghormatan

³³ Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2007.

Calon Bupati kepada Kiai sebagai guru dan panutan masyarakat. Akan tetapi, konteks waktu dan peristiwa yang melatarbelakangi kunjungan tersebut yaitu Pilkada menjadikan kunjungan tersebut tidak hanya dapat dimaknai sebagai agenda kultural biasa, namun juga merupakan agenda politik yang tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan.

Untuk memahami kedekatan politik antara calon bupati Tuban dengan Kiai dan Ulama dalam Pilkada tahun 2020, penulis merasa perlu untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fenomena politik kedekatan politisi dengan elite agama seperti yang dibahas dalam penelitian ini layak untuk dilihat dari perspektif lain sehingga dapat dimaknai secara berbeda dan lebih mendalam. Penelitian kualitatif akan menjelaskan bagaimana latar belakang sebuah peristiwa atau fenomena sosial, relasi-relasi antar aktor yang terlibat dalam peristiwa, menggambarkan pandangan dan sikap-sikap aktor, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, beserta implikasi yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, fenomena sosial yang dalam penelitian ini adalah relasi politik antara calon bupati dengan Kiai dalam Pilkada Tuban tahun 2020 dapat dijelaskan dengan rinci sehingga dapat memunculkan makna baru.

1.7.3 Subjek Penelitian

Samsu menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan orang atau hal, benda, tempat data pada variabel penelitian, serta posisi subjek penelitian sebagai yang dipermasalahkan.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada aktor-aktor utama yang terlibat dalam pilkada Tuban, yaitu calon bupati

³⁴ Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

Tuban dalam Pilkada 2020 nomor urut 02 Aditya Halindra Faridzky. Melalui salah satu juru kampanye, penulis menghubungi informan tersebut dan melakukan wawancara pada 7 Januari 2021. Alasan penulis memilih informan tersebut adalah karena informan tersebut merupakan calon bupati Tuban dalam pilkada 2020 yang melakukan kunjungan atau *sowan* kepada beberapa Kiai dan Ulama di berbagai wilayah Tuban dan sekitarnya selama masa kampanye Pilkada 2020. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Lindra-Riyadi yaitu Sugeng Winoto pada 12 Juni 2020 karena beliau mengetahui berbagai persoalan terkait dengan kegiatan *Sowan* yang dilakukan Aditya Halindra kepada Kiai selama masa kampanye Pilkada 2020.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dipilih dan menggunakan teknik wawancara bersifat *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁵ Teknik tersebut dipakai sebab tidak semua subyek penelitian dapat memenuhi kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan dikaji. Subyek penelitian dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria yaitu calon bupati Tuban dalam pilkada Tuban tahun 2020 yang telah melakukan kunjungan atau *sowan* kepada Kiai atau Ulama pada masa Pilkada 2020, anggota tim sukses kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, Kiai atau Ulama yang pada masa kampanye Pilkada Tuban 2020 menjalin relasi dengan calon bupati dan wakil bupati.

³⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabhet, 2016

Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai beberapa narasumber. Pertama, Calon Bupati Pilkada Tuban 2020 nomor urut (02) Aditya Halindra Faridzky. Penulis menghubungi narasumber tersebut melalui ayah dari rekan penulis, yaitu Sugeng Winoto (narasumber kedua), yang merupakan salah satu anggota tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (02). Alasan penulis memilih narasumber tersebut adalah karena narasumber tersebut merupakan subjek utama yang merupakan calon bupati Tuban dalam pilkada 2020.

Kedua, penulis mewawancarai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Linda-Riyadi, yaitu bapak Sugeng Winoto. Penulis berhasil terhubung ke narasumber tersebut melalui anaknya yang merupakan rekan penulis. Alasan memilih narasumber tersebut adalah karena narasumber aktif dalam kegiatan kampanye calon bupati nomor urut (02) Aditya Halindra Faridzky dan terlibat langsung dalam merencanakan dan melakukan kegiatan *sowan* ke Kiai yang dilakukan oleh Aditya Halindra Faridzky selama masa kampanye Pilkada Tuban 2020.

1.7.5 Jenis Data

Tujuan utama penelitian adalah guna memecahkan sebuah permasalahan. Proses pemecahan masalah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan data yang relevan dan akurat, karena tanpa data yang relevan dan akurat tidak akan terwujud tujuan penelitian yang ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber dari subjek penelitian yang merefleksikan topik maupun judul sebagai objek penelitian. Data yang dipakai

harus benar-benar representatif atau mampu mewakili setting yang akan dijelaskan atau digambarkan, mampu menunjukkan objektivitasnya, serta masih berlaku pada saat penelitian dilaksanakan (*up to date*).

Terdapat dua jenis data yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dan segera oleh peneliti dengan tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui sumber pertama, baik itu yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber, maupun observasi di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak di luar peneliti. Artinya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, meskipun pada mulanya bukan bertujuan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, data sekunder dapat pula disebut sebagai data pelengkap guna memperkaya data, sehingga dapat menguatkan data primer yang didapatkan.³⁶

1.7.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang direkam dan diputar kembali untuk ditulis menjadi transkrip wawancara. Proses analisis data kualitatif yaitu dengan menghubungkan hasil temuan dengan referensi dan teori yang berlaku dan mencari hubungan di antara sifat-sifat

³⁶ *Ibid*

kategori. Selanjutnya data tersebut akan diinterpretasikan secara deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan, didukung dengan data sekunder sebagai pelengkap, dan dibandingkan dengan data literatur untuk menjawab pola dinamika interaksi politik antara calon bupati dengan Ulama NU dalam pilkada Tuban tahun 2020.